

LUKA INI BUKAN KARENA DIKALAHKAN, MELAINKAN KARENA DIKHIANATI

Fawaizul Umam*

Gus Dur itu “jimat” NU. Demikianlah sebutan populer yang diungkap KH Muchit Muzadi dan KH M. Cholil Bisri ke publik saat merespons politisi Poros Tengah yang bersikeras mendorong Gus Dur jadi presiden sekaligus merayu simpati NU menjelang Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999. Dimaksudkan sebagai *warning* agar tidak mempermainkan Gus Dur karena di kalangan Nahdliyin ia laksana “jimat”, diyakini bertuah sebagai mata air kearifan dan inspirasi kebenaran, buah yang tak pernah lekang oleh panas dan dilapukkan hujan.

Sebutan itu tidaklah berlebihan. Hingga kini, tidak ada tokoh NU yang begitu dimuliakan, disayang, diistimewakan, dan dicintai seperti Gus Dur. Cinta terhadapnya bahkan tidak hanya datang dari kaum Nahdliyin di mana ia didekap dan dihayati seperti “jimat”, tetapi juga berasal dari berbagai kalangan lintas etnis dan agama. Ketika wafat pun, cinta kepadanya terus mengalir...

Inilah sepotong kisah getir tentang cinta yang otentik dan bagaimana ia diekspresikan. Cinta yang tak sederhana dari orang-orang sederhana kepada sang guru bangsa penuh kesederhanaan, Gus Dur. Di suatu waktu, di paruh awal 2001. Di suatu tempat, di kawasan utara ujung timur Pulau Jawa.

Kisahnyanya mengajak kita menengok serangkaian peristiwa beraroma politis yang berlangsung pada paruh awal 2001 di sepanjang wilayah Situbondo Banyuwangi, tepatnya di sebuah kecamatan tempat aku dilahirkan. Wilayah di mana orang-orang sederhana itu bermukim, orang-orang yang oleh euforia Reformasi 1998 berkesempatan punya kebanggaan tentang arti memiliki seorang presiden. Tak aneh, mengingat yang menjadi presiden kali ini ialah KH Abdurrahman Wahid, sosok kinasih yang berasal dari kalangan mereka sendiri, kaum muslim tradisional.

Sedihnya, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Tak sampai setahun Gus Dur terpilih dan ditetapkan sebagai Presiden RI oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 20 Oktober 1999, pemerintahannya terus menerus dilemahkan justru oleh kelompok yang semula bersikeras menggadagadangnya, Poros Tengah *wa alihi wa shohbihi*. Perasaan dipermainkan dan dikhianati tentu saja meruap, tidak hanya di kalangan kiai dan pesantren, tetapi juga berkecambah di tengah mereka. Kebahagiaan itu perlahan memalih rupa menjadi kesedihan dan kemudian menjadi gelegak amarah yang mendidih. Melalui pelengseran Gus Dur, kaum tradisional itu dipaksa mengkhidmati luka pengkhianatan, setelah dipanggul-panggul lalu dijungkalkan. Keluguan mereka dalam memaknai kebahagiaan politis yang berakhir cepat itu ternyata harus dibayar mahal...

Bulan-bulan di paruh awal 2001 itu memang melelahkan. Konstelasi politik nasional di rentang waktu itu terus memanas gegara *ontran-ontran* politik yang berujung pemakzulan Gus Dur dari kursi kepresidenan sebagaimana akhirnya terkonfirmasi oleh buku “Menjerat Gus Dur” karya Virdika Rizky Utama. Hampir di setiap momen, cerita “kewalian” Gus Dur dan ancaman pelengseran terhadapnya

selalu menjadi tema bincang utama. Aroma kesedihan dan kebencian dan juga ketakberdayaan campur aduk mencipta kegetiran. Mereka, orang-orang sederhana, itu berupaya menunjukkan cinta kepada Presiden Gus Dur, sang “jimat NU”. Mengekspresikannya dengan cara khas kebatinan kalangan bawah.

Suasana kebatinan itu pada gilirannya diejawantahkan dalam aneka rupa perlawanan. *Rerasan*, menebar spanduk, berdemo adalah cara mereka merawat cinta dan rasa hormat pada sang “jimat” tersebut. Sebagian ekspresi pada akhirnya memang anarkis, dan karena itu kontraproduktif. Namun, itu “hanyalah” ekspresi dari rasa cinta terhadap Gus Dur, ekspresi yang lahir dari ketidakberdayaan di hadapan “permainan” para elite bebal di Jakarta sana.

Di bulan-bulan itu, demonstrasi memang berlangsung di mana-mana, di berbagai daerah, termasuk di Banyuwangi dan Situbondo. Para pendemo yang oleh media massa diidentifikasi sebagai massa “pro-Gus Dur” terus berusaha melawan upaya sistematis pelengseran atas Gus Dur dari kursi presiden. Pada saat yang sama, demo kontra yang bersetuju siasat pelengseran juga terjadi di sejumlah daerah, tetapi sama sekali tidak pernah berlangsung di dua kabupaten tersebut. Wajar, karena kedua kabupaten adalah salah dua basis utama pendukung Gus Dur yang *notabene* kantong utama Nahdliyin tapal kuda.

Khusus di tanah kelahiranku, Banyuwangi, lebih khusus lagi di kecamatanku, situasi keseharian saat itu memang terasa hangat cenderung panas. Kejengkelan menjalar dari forum-forum pengajian, even *hajatan*, dan juga membuncah di momen-momen *rerasan* sambil lalu usai *tahlilan*. Orang-orang riuh membincang Gus Dur dengan penuh getir. Juga geram. Seiring memanasnya eskalasi, kejengkelan itu lalu tumpah di jalanan. Selain dalam bentuk demo, juga tertuang di bentangan spanduk-spanduk. Di sejumlah ruas jalan di Banyuwangi, termasuk kecamatanku, hingga Situbondo kala itu banyak bertebaran spanduk-spanduk heroik mendukung Gus Dur. Sebagian berbalut kemarahan, sebagian lagi bernada humor. Semuanya berpangkal pada rongrongan konspiratif tiada henti para elite di Jakarta terhadap pemerintahan Gus Dur yang masih seumur jagung.

Saat itu, aku sudah berada di Lombok NTB (Nusa Tenggara Barat), menjalani tahun pertama sebagai dosen di IAIN Mataram sejak Maret 2000. Namun, situasi yang terus memanas itu memaksaku sering pulang, sebulan sekali, bahkan belakangan menjadi seminggu saat eskalasi kian memanas. Apalagi Ayah sering menelponku, memintaku pulang jika mungkin. Ia seorang rais syuriah MWC (Majelis Wakil Cabang) NU (Nahdlatul Ulama) kecamatan setempat yang juga sangat aktif memfasilitasi berdirinya kepengurusan DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang) PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), sebuah partai politik besutan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Di bulan-bulan itu, beliau juga selalu bersemangat mengajakku berbincang tentang NU, pesantren, soal *khittah*, PKB, Gus Dur, Buloggate-Bruneigate, memorandum, ancaman Sidang Istimewa MPR, dan *last but not least...* Amien Rais.

Hari-hari menjelang dan sesudah dilayangkannya Memorandum I DPR terhadap Presiden Gus Dur, semakin banyak saja tamu Ayah berdatangan ke rumah. Biasanya yang bertamu wali santri atau orang-orang yang meminta doa atau nasihat untuk problem-problem keseharian mereka. Saat itu, para tamu tidak hanya kiai-kiai atau pengurus NU setempat, tetapi juga para politisi lokal rajin berkunjung. Diskusi-diskusi sering berlanjut hingga tengah malam. Gayeng. Diskusi tak kalah

gayeng juga berlangsung di serambi masjid pesantren di mana anak-anak muda berkumpul. Di situ pula aku bergabung.

Anak-anak muda itu, seiring kian memanasnya situasi, memang semakin banyak berganti-silih datang bertamu. Aku tidak tahu pasti apakah mereka berasal dari Banser atau Ansor atau Garda Bangsa PKB. Mereka lebih suka menyebut diri Pasukan Berani Mati (PBM). Aku juga tak tahu pasti apakah secara struktural mereka memang terkoordinasi dengan KH Nuril Arifin, Panglima PBM, komunitas yang sangat militan membela Gus Dur. Aku tak berminat menanyakannya kala itu. Yang pasti, suasananya memang agak mencekam seperti masa teror ninja di kurun antara Februari-September 1998. Pada saat teror ninja dulu, anak-anak muda juga berdatangan. Minta “diisi”, biar kebal senjata melawan ninja, lalu berjaga di lingkungan pesantren siang-malam. Menurut seorang sepuh tetangga pesantren, suasananya sepintas seperti menyambut perang, menegangkan. “Mirip seperti 1965 dulu, mau merangi orang-orang Gestapu,” katanya. Mungkin penggambarannya agak berlebihan, tapi aku tahu betul para tamu saat berdiskusi lebih sering pasang muka serius diliput amarah ketimbang *guyon* tertawa-tawa seperti biasa.

Aku sendiri, setiap kali pulang ke Banyuwangi, selain menemani *jagongan* diskusi anak-anak muda itu juga semakin sering dimintai “kata-kata” provokatif untuk ditorehkan di spanduk-spanduk yang hendak mereka bentangkan di jalan-jalan. Pimpinan anak-anak muda itulah yang memintaku. Dengan senang hati kupenuhi. Mereka menuliskannya di spanduk-spanduk dengan sapuan kuas kasar; kata mereka, biaya pembuatannya berasal dari hasil “bantingan” antarmereka sendiri. Diksi yang kupilihkan umumnya bernada *satire* atau sindiran-sindiran kocak. Namun, belakangan, mereka lebih “mandiri” dalam membuat spanduk. Diksi mereka cenderung penuh amarah, menantang, bahkan mengancam.

Kemarahan betul-betul memuncak setelah DPR melayangkan Memorandum I kepada Presiden Gus Dur pada 2 Februari 2001. Tumpah ruah di jalanan. Hari-hari setelah itu, demo semakin sering berlangsung, baik di Situbondo maupun Banyuwangi. Nyaris tiap hari. Dan lebih panas tinimbang aksi-aksi penolakan terhadap kerja Panitia Khusus (Pansus) Buloggate-Bruneigate yang marak sebelumnya.¹ Kini aksi tidak lagi terpusat di DPRD setempat, tetapi sudah berwujud aksi-aksi blokade ruas jalan-jalan utama di dua kabupaten itu dan juga aksi melumpuhkan Pelabuhan Ketapang semakin sering terjadi.

Kiai-kiai setempat semakin sibuk meredam situasi. Merekalah yang sejauh itu mampu meredam massa agar aksi-aksi itu tak berujung anarkis. Kala itu, aparat keamanan nyaris tak berdaya. Cenderung hanya diam menonton; boleh jadi tak menyangka gelombang amarah massa begitu dahsyat. Dan aksi-aksi sedemikian merata di banyak daerah, tidak hanya di dua kabupaten tersebut. Menanggapi aksi-aksi yang kian cenderung memanas tersebut KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, mengaku bahwa PBNU tidak mampu lagi mengendalikan warga Nahdliyin

¹Pansus ini resmi dibentuk DPR pada Rapat Paripurna tanggal 5 September 2001. Dimaksudkan untuk mengusut lebih lanjut apa yang oleh para politisi DPR sebut kasus korupsi di Bulog dan hadiah dari Sultan Brunei Darussalam di mana Presiden Gus Dur mereka tuduh terlibat di dalamnya. Pansus ini hanya dijadikan pintu masuk bagi DPR untuk memberi sanksi politis berupa *impeachment* terhadap Gus Dur. Sementara secara hukum, tuduhan itu sama sekali tidak pernah terbukti, bahkan hingga Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009, sehingga pelengseran dirinya merupakan tindakan politik inkonstitusional.

yang marah. Menurutnya, situasi seperti itu hendaknya menjadi tanggung jawab semua pihak untuk menuntaskannya secara arif dan bijaksana. Ia juga menghimbau agar Sidang Istimewa MPR (sebagai konsekuensi lanjut Memorandum DPR) tidak perlu digelar. “Jika SI sampai digelar, dapat dikatakan DPR sebagai muara segala konflik yang terjadi!” tandasnya kala itu.²

Di dua kabupaten tersebut, hari-hari setelah Memorandum DPR memang mencekam. Jalan protokol sepanjang Situbondo, terutama di zona timur, hingga Banyuwangi belahan utara diblokade massa. Pepohonan sepanjang tepi jalan ditebangi dan dibiarkan melintang menutup jalan.³ Akibatnya, arus lalu lintas Surabaya menuju Bali via Situbondo lumpuh total. Saat itu arus lalu lintas terhenti di Situbondo dan terpaksa dialihkan lewat Jember via Bondowoso. Alternatif jalur lain ialah Surabaya lewat Lumajang menuju Jember kemudian ke Banyuwangi (Pelabuhan Ketapang) atau setiba di Besuki Situbondo mau tak mau harus ambil jurusan Arak-Arak menuju Bondowoso lalu ke Jember dan berlanjut ke Ketapang. Sehari dua hari pengalihan tersebut lancar. Namun, di hari berikutnya, aksi tebang pohon ternyata juga menular ke Banyuwangi belahan selatan. Sejumlah ruas jalan menuju Banyuwangi dari arah Jember tertutup oleh puluhan batang pohon yang dipasang melintang membarikade jalan. Akibatnya, jalur Jember-Banyuwangi juga lumpuh total sehingga jalur menuju ke Pelabuhan Ketapang dari arah selatan juga praktis lumpuh.

Aksi blokade jalan bermula di Situbondo. Adalah KH Achmad Fawaid As’ad, Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo yang menjadi motor utamanya. Kita tahu, Kiai Fawaid adalah sala satu kiai muda pendukung militan Gus Dur. Di bulan-bulan itu, dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat menemani dan selalu berada di sisi Gus Dur. Sebagai putra kiai kharismatik KH As’ad Syamsul Arifin, inisiasinya didukung dan dengan cepat diduplikasi oleh para pecintanya, khususnya di kawasan Situbondo dan Banyuwangi. Dua kabupaten ini, tak terkecuali masyarakat di kecamatananku, memang basis utama santri, alumni, dan simpatisan Pesantren Sukorejo.

Awalnya, blokade dilakukan dengan mengelat *istighatsah* di tengah jalan. Lalu, entah kenapa dan tak jelas siapa yang menyuruh, di hari-hari berikutnya blokade *istighatsah* tersebut berubah menjadi aksi tebang pohon dan melintangkannya di tengah jalan. Aparat keamanan tak berdaya mencegah, apalagi menangkapi. Ketika terdengar desas-desus Kiai Fawaid bakal ditangkap untuk dimintai tanggung jawab atas aksi-aksi tersebut, orang-orang sederhana itu kembali turun ke jalan dan santer menebar ancaman, “Jangankan sampai ditangkap, menyentuh sedikit saja kulit *tang keaeh* (bhs. Madura, kiai saya), Situbondo-Banyuwangi pasti banjir darah”.⁴ Dan kita tahu, Kiai Fawaid tetap leluasa bepergian menemani Gus Dur ke berbagai tempat.

²Lihat “Ribuan Massa pro-Gus Dur Turun ke Jalan” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/7580/ribuan-massa-pro-gus-dur-turun-ke-jalan> (diakses 19 Januari 2020).

³Lihat “Laporan Utama: Tumpas Kelor Robohkan Beringin” dalam <http://arsip.gatra.com/2001-02-17/majalah/artikel.php?id=45192> (diakses 18 Januari 2020).

⁴Berdasar kesaksian KH Muhyiddin Abdusshomad, Pengasuh PP Nurul Islam Jember, saat menyampaikan manaqib *almaghfurlah* KH Fawaid As’ad pada acara Haul Majemuk Masyayikh Pesantren Sukorejo Situbondo pada 13 Januari 2020 tempo hari.

Pada saat itu, Pelabuhan Ketapang yang merupakan satu-satunya pintu penyeberangan terdekat dari Banyuwangi (Jawa) ke Gilimanuk (Bali) juga tak luput dari aksi blokade massa.⁵ Ratusan anak muda yang mendaku massa Pasukan Berani Mati memblokir pelabuhan yang berjarak sekitar 15 kilometer ke selatan dari tempatku tinggal. Mereka menduduki pelabuhan dan melakukan *istighatsah*. Akibatnya, arus lalu lintas penyeberangan menuju Bali dan sebaliknya terhambat. Lumpuh total. Kemacetan mengular hingga ke Bangsring, sebuah desa di utara Banyuwangi, sekitar 15 km dari Pelabuhan Ketapang. Mereka mengaku, aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap upaya sejumlah elite politik di Jakarta yang terus menerus merongrong dan mendesak Gus Dur mundur.

Gus Dur sendiri selaku presiden menyesalkan insiden pemblokiran jalan dan pelabuhan, apalagi aksi tebang pohon. “*Ngapain* ngerusak-rusak. Selesaikan dengan proses demokrasi saja,” ujarnya. Selain menyesalkan, Gus Dur juga meminta aparat keamanan menindak tegas aksi massa yang merusak, bahkan Gus Dur telah memerintahkan agar para pengurus PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) se-Indonesia bisa menenangkan massanya di daerah masing-masing.⁶ Akhirnya, guna meredakan situasi, polisi meminta para kiai untuk mencegah massa terus beraksi anarkis.

Setelah Gus Dur positif dilengserkan pada 23 Juli 2019, situasi panas mencekam justru mereda, mendingin, termasuk di kawasan Banyuwangi dan Situbondo. Hal itu dimungkinkan karena PBNU dan para pengurus PWNU di daerah-daerah aktif menginstruksikan warganya untuk menahan diri. Dalam hal ini peran para kiai dalam meredakan aksi-aksi kemarahan kaum muslim tradisional itu sangatlah signifikan. Demikian pulalah yang dilakukan sejumlah kiai di Situbondo dan Banyuwangi, termasuk di kecamatanku. Mereka sangat aktif menenangkan massa di banyak tempat dan forum.

Di kediaman Ayahku sendiri, hingga dua atau tiga hari setelah Gus Dur dimakzulkan, para tamu masih banyak berkumpul di rumah hingga larut malam. Juga anak-anak muda itu. Sejumlah kiai bergantian hadir. Juga beberapa politisi PKB setempat. Anak-anak muda meriung di pintu, teras, dan serambi masjid. Tegang menunggu “komando” para kiai. Amarah dan kecewa masih membayang kuat di wajah mereka.

Menjelang tengah malam, seorang kiai sepuh panutan tiba membawa “komando” itu. Sejumlah pengurus NU setempat menemani. Ia meminta Ayahku untuk menyampaikan “komando” itu ke para hadirin. Namun, Ayah mempersilahkan sang kiai untuk menyampaikannya sendiri di hadapan mereka. Dan pesan “komando”-nya jelas, hadirin diminta pulang, kembali ke rumah masing-masing. Diminta bersabar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Namun, hadirin bergeming. Para kiai yang hadir terdiam menunduk. Ruang tamu terasa panas. Aku, yang duduk *ndomprok* di samping kursi Ayah, hanya bisa ikutan diam. Beberapa tamu terdengar terisak. Anak-anak muda di luar mendengung kesal. Lalu, pelan-pelan hening.

⁵Lihat “Pendukung Gus Dur Menduduki Gedung Rakyat” dalam <https://www.liputan6.com/news/read/9563/pendukung-gus-dur-menduduki-gedung-rakyat> (diakses 18 Januari 2020)

⁶Lihat “Dihentikan, Aksi Penebangan Pohon di Stubondo” dalam <https://nasional.tempo.co/read/24001/dihentikan-aksi-penebangan-pohon-di-situbondo/full&view=ok> (diakses 19 Januari 2020).

Sungguh, andai kalian juga hadir di situ, aku yakin engkau tak akan kuat membendung air mata. Melihat para kiai yang mencoba tegar, helaan nafas, isak tangis, dan wajah-wajah tak rela memendam amarah dari anak-anak muda itu sungguh mengiris hati. Andai karena kekalahan, luka yang ditimbulkan tak akan sedalam ini. Ini bukan kekalahan. Ini pengkhianatan. Perasaan telah dipermainkan begitu kuat terasa. Makanya luka dan kecewa yang ditimbulkannya sungguh tak terperi.

Sambil menahan tangis, sang kiai sepuh menghiba memohon-mohon agar hadirin pulang. Meminta mereka untuk menyudahi kemarahan dan belajar mengikhlaskan. Di ujung *tawshiyah*-nya, ia berkali-kali berupaya meyakinkan hadirin bahwa ada yang lebih penting dari politik dan kekuasaan, yakni kemanusiaan. Ia juga berkali-kali menyebut bahwa tidak ada jabatan politik di dunia ini yang pantas dipertahankan mati-matian, apalagi sampai harus menumpahkan darah. Belakangan baru aku tahu bahwa itu semua bagian dari ucapan Gus Dur untuk mendinginkan massa yang terus bergolak panas di banyak daerah kala itu.

Tepat ketika *tarhim* penanda sepertiga malam terakhir dikumandangkan santri dari *loudspeaker* masjid, hadirin satu demi satu pamit undur diri beranjak pulang. Beberapa anak muda yang masih bertahan terduduk lesu di emperan masjid pesantren. Aku sempatkan menemani mereka. Mereka tak lagi antusias mengajakku diskusi. Kami lebih banyak diam. Hingga Subuh menjelang...

Duh, andai saja kiai-kiai tidak bergerak meredam, aku yakin darah pasti tumpah. Dan kita bisa menduga ke mana dan kepada siapa ujung kemarahan itu mengarah!

Berminggu-minggu setelahnya, Ayah lebih banyak diam. Masih tetap menerima tamu, tetapi sepertinya menghindari obrolan politik. Di ruang tamunya, ia tetap membiarkan foto Gus Dur dalam pose Presiden RI terpajang. Baginya, Presiden RI tetaplah Gus Dur. Ia tetap meyakini bahwa pelengseran Gus Dur tidak sah karena prosesnya inkonstitusional. Belakangan ia memutuskan mundur dari Dewan Syura DPAC PKB setempat dan memilih hanya fokus berkhidmat di Syuriah MWC NU dan kepengurusan MUI kecamatan setempat hingga kewafatannya pada 31 Maret 2009.

Begitulah sepotong kisah tentang bagaimana orang-orang sederhana mengekspresikan cinta mereka yang tidak sederhana kepada Gus Dur, sosok penuh kesederhanaan. Mereka membela Gus Dur, melawan aniaya konspiratif para politisi yang bersikeras melengserkannya. Bukan semata karena ia Presiden RI yang sah, tetapi juga karena Gus Dur adalah “jimat” NU tercinta yang terus menerus dianiaya.

Dengan cinta yang tak sederhana, orang-orang sederhana itu sudah melawan. Mereka telah melakukan perlawanan, kurang-lebih seperti ungkapan Nyai Ontosoroh kepada Minke, dua tokoh rekaan Pramoedya Ananta Toer di halaman terakhir *Bumi Manusia*: “Kita sudah melawan, sebaik-baiknya, se hormat-hormatnya.”

*Penulis adalah Wakil Pengasuh
YPP Miftahul Ulum Bengkak Wongsorejo Banyuwangi